

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI ULAT SUTERA DI KABUPATEN SOPPENG

A.Dian Indah Lestari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Muh. Nur Yamin

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: nuryamin1@gmail.com

ABSTRAK

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ulut Sutera di Kabupaten Soppeng. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si dan Ibu Dr. Hj. Andi Cudai Nur, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberdayakan petani ulat sutera dan kebijakan yang dibuat untuk mendukung pemberdayaan serta pencapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema kultural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sesuai dengan teori terkait indikator *entrepreneur*, koordinator, dan fasilitator yaitu telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya hasil yang ingin dicapai belum maksimal. Adapun pemberdayaan masyarakat terkait dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, juga telah dilaksanakan dengan baik namun belum mendapat hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dan inovasi untuk pemecahan masalah. Adapun yang menjadi saran dari peran pemerintah daerah dalam memberdayakan petani ulat sutera yaitu membuat atau meningkatkan program yang lebih partisipatif, membuat inovasi pemecahan masalah, dan peningkatan pengawasan.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan.

1.Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penetapan bahwa daerah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus segala urusan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah otonom. Pemerintah daerah memegang peranan penting untuk membangun daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah beserta seluruh perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanah desentralisasi. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan, maka semakin baik pula peningkatan pembangunan yang kemudian akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberdayakan masyarakat. Pemerintah menjadi stimulator bagi masyarakat untuk bergerak dan bertindak agar dapat berkembang serta menjadi masyarakat produktif. Memberdayakan masyarakat merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan pada lapisan masyarakat.

Memberdayakan mengandung arti memampukan menuju kemadiriian serta pengembangan kapasitas. Kemandirian yang dimaksud yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan dirinya sebagai masyarakat yang turut berpartisipasi terhadap pembangunan sumberdaya manusia oleh alam Kabupaten Soppeng termuat dalam peraturan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan pertanian sutera di Kabupaten Soppeng ada sejak tahun 1964 dimana saat itu bibit sutera didatangkan langsung dari negara Jepang. Kegiatan persuteraan terbagi atas kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu merupakan kegiatan

penanaman murbei sebagai pakan, pembudidayaan ulat hingga pemintalan sedangkan, kegiatan hilir merupakan kegiatan memproduksi benang sutera menjadi produk kreatif hingga pada pemasaran. Kegiatan hulu menjadi kegiatan yang mendominasi di kalangan masyarakat.

Sutera mencapai Puncak keemasannya pada tahun 1968 – 1971. beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sumberdaya sehingga pada tahun 1973 terjadi penurunan produksi diakibatkan ulat terserang penyakit Fibrin sehingga kualitas kokon yang dihasilkan kurang baik. Setelah itu kemudian beralih ke bibit dari China yang digunakan sampai sekarang dan juga bibit lokal. Produksi sutera meskipun mengalami timbul tenggelam namun masyarakat tetap menggeluti pertanian ulat sutera sampai saat ini. Kokon yang dihasilkan juga mengalami naik turun dalam produksinya. Pada tahun 2014 produksi kokon mencapai 11.523,000 Kg kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015, 2016, 2017 masing-masing 8.361,000 Kg, 7.195,404 Kg, 6.027,884 Kg dan sedikit peningkatan pada tahun 2018 sebesar 9.372,015 Kg. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung persuteraan khususnya di Kecamatan Donri-Donri salah satunya yaitu membentuk secara maksimal karena masih banyak kelompok tani yang tidak ikut serta dalam pelatihan tersebut.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azun dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat” menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan situasi secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dinyatakan berperan aktif sebagai seorang kepala desa namun dibagian perencanaan mendapat sedikit

hambatan karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam sosialisasi program yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dijelaskan sebelumnya dimana perbedaannya terletak pada lokus dan fokus yang digunakan. Lokus dari penelitian ini yaitu di Kecamatan Donri-Donri Desa Pising karena di lokasi tersebut merupakan Kecamatan yang memiliki petani sutera terbanyak dimana terdapat 14 kelompok tani sutera di Kabupaten Soppeng, lima diantaranya bertempat di desa Pising dan kelompok lainnya tersebar di beberapa desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng yang masih tetap menekuni kegiatan persuteraan. Fokus penelitian ada pada peran pemerintah memberdayakan petani ulat sutera.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terdapat permasalahan-permasalahan seperti kurang aktifnya kelompok tani, belum adanya regulasi tersendiri untuk mengatur kegiatan hulu hilir sebagai peningkatan perekonomian masyarakat terhadap kegiatan persuteraan sehingga dalam tulisan ini, peneliti akan meneliti “ **Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Ulat Sutera di Kabupaten Soppeng**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Masyarakat Petani Ulat Sutera di Kabupaten Soppeng?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani ulat sutera di Kabupaten Soppeng.

4. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan mengandung arti memungkinkan menuju kemandirian dan pengembangan kapasitas. Kemandirian yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk

menunjukkan ciri sebagai masyarakat yang turut berpartisipasi terhadap pembangunan sumberdaya manusia oleh pemerintah serta berperan aktif dalam mengembangkan kapasitas diri agar pembangunan dapat dilakukan secara terarah, dalam Widjaja (2017:77).

Pemberdayaan atau *empowerment* termasuk dalam konsep pembangunan daerah otonom untuk meningkatkan potensi daya guna masyarakat. Lapisan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pemberdayaan di dalam meningkatkan potensi manusia agar dapat berorientasi pada pertanggungjawaban dengan melakukan segala bentuk pekerjaan yang berprestasi untuk dikembangkan sesuai kualitas sumber daya manusia yang dapat sejahtera dan mandiri dalam bidang yang ditekuni untuk mencapai tujuan.

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan (*powerless*), dalam Sumaryadi (2013:57)

Widjaja (2014:169) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonom, sosial, agama dan budaya.

b. Teori Pemberdayaan

Menurut Kartasmita dalam Mulyawan (2016:67-68) upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek yaitu 1) *enabling*, 2) *empowering*, 3) *protecting*. Ketiga sisi itu diuraikan sebagai berikut:

1. Enabling

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak masyarakat

yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran, (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. *Empowering*

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat pada bagian ini diprlukan langkah yang lebih nyata daripada menciptakan iklim dan suasana. Langkah nyata yang dimaksud adalah lebih membuka dan melihat peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat lebih berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang dianggap paling dasar adalah meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, peluang pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana pra sarana fisik (jalan, listrik, irigasi, jembatan) dan sosial (sekolah, fasilitas kesehatan, ketersediaan lembaga pendanaan, pelatihan, dll)

3. *Protecting*

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi mengandung konsep mencegah yang lemah semakin lemah dan yang kuat semakin berdaya. Arti melindungi adalah mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam persaingan serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan bukan membuat masyarakat semakin tergantung tetapi sebaliknya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik, sejahtera dan mencapai kemandirian.

6. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati.

7. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan petani ulat sutera di Desa Pising. Salah satu dari peran pemerintah adalah peran pemberdayaan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan maka peran pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai pemberdayaan dapat diambil salah satunya adalah menurut Munir (2016) terdiri dari *entrepreneur*, koordinator, dan fasilitator. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran yang dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait peran pemerintah maka diperoleh informasi sebagai berikut:

a. *Entrepreneur*

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan melaksanakan usaha untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dengan melakukan suatu usaha maka akan membuat masyarakat menjadi produktif serta mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam. Tindakan pemerintah merupakan dorongan bagi masyarakat untuk mengembangkan kualitas diri melalui usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan pertanian ulat sutera yang sudah ada yaitu dengan mendukung kegiatan tersebut melalui program yang kedepannya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Bupati terpilih saat ini mencanangkan untuk mengembalikan kejayaan sutera seperti awal perkembangan sutera di Kabupaten Soppeng, melalui itulah pemerintah daerah mendukung kegiatan persuteraan mulai hulu hingga hilir.

Melihat peluang dari usaha persuteraan ini bahwa usaha ini dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi daerah secara umumnya dan bagi masyarakat secara khususnya yang dijelaskan oleh Munir (2016) benar bahwa daerah dapat mengembalikan eksistensi lokal persuteraan sebagaimana Kabupaten

Soppeng dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sutera di Sulawesi Selatan, Begitupun dengan petaninya sendiri bisa meningkatkan penghasilannya melalui persuteraan ini.

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berdasar pada sub indikator peningkatan ekonomi. Penghasilan petani yang selalu tidak menentu dan tidak dapat diprediksi kedepannya, dijelaskan bahwa dalam memelihara ulat sutera dipercaya bahwa penghasilan tergantung dari rezeki masing-masing petani apabila telur berhasil menetas dengan baik maka penghasilan juga akan meningkat tetapi sebaliknya apabila telur tidak berhasil menetas dengan baik maka berdampak pada rendahnya penghasilan. Jadi penghasilan yang tidak menentu dirasakan oleh petani belum mampu untuk meningkatkan perekonomian dan juga pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Koordinator

Dalam penelitian ini peran koordinator berdasarkan sub indikator menetapkan kebijakan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk mendukung persuteraan terkhususnya pada kegiatan hulu atau kegiatan pertanian ulat sutera ada tiga program yaitu ekstensifikasi dimana dilakukan perluasan areal murbei sebagai pakan ulat sutera, kedua adalah intensifikasi yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa alat dan bahan yang dibutuhkan oleh petani ulat sutera mulai dari peralatan untuk mengelola daun murbei seperti gunting stek maupun peralatan pemeliharaan ulat sutera seperti baskom, alat pengokonan (seriframe), kawat, lantai. Ketiga yaitu pembagian telur ulat sutera secara gratis kepada petani. Telur ulat sutera tersebut didatangkan dari China sehingga kualitas telur juga bagus. Ketiga program yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut sudah dijalankan selama kurang lebih empat

tahun terakhir dengan data penyaluran telur pada tahun 2017 sebanyak 350 box, tahun 2018 sebanyak 500 box, tahun 2019 sebanyak 500 box dan tahun 2020 sebanyak 500 box. Semua program dibiayai oleh pemerintah daerah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

c. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berdasarkan yang dikemukakan oleh Munir (2016) bahwa pemerintah sebagai fasilitator mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal. Perbaikan lingkungan merupakan satu faktor penunjang keberhasilan usaha, melalui itu dapat di lihat lingkungan seperti apa yang bisa membantu memperbaiki keadaan suatu usaha dan lingkungan seperti apa yang tidak baik untuk suatu usaha. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah daerah melakukan perbaikan lingkungan lebih banyak dalam bentuk memfasilitasi petani ulat sutera, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Widjaja (2013) bahwa peran unsur-unsur pembangunan non pemerintahan kedepannya harus menempati porsi yang lebih besar sebagai pelaksana suatu pembangunan dimana pemerintah akan lebih berada pada posisi memfasilitasi kebutuhan unsur-unsur tersebut.

8. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Ulat Sutera di Kabupaten Soppeng, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Enabling ,

potensi petani ulat sutera yang dilihat oleh pemerintah daerah sangat berpeluang untuk memberikan penghasilan yang tinggi bagi petani, pemerintah daerah telah melakukan pengembangan potensi dengan menggambarkan peluang-peluang yang bisa dicapai kedepannya agar usaha persuteraan ini bisa kembali memberikan

manfaat yang besar bagi petani dan juga bagi Kabupaten Soppeng sebagai suatu nilai lokal yang harus dipertahankan.

b. Empowering,

pemberdayaan masyarakat melalui penguatan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik seperti diberikannya bantuan berupa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam usaha pertanian. Adapun penyediaan sarana dan prasarana sosial seperti dilakukannya sosialisasi serta pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi pertanian ulat sutera.

c. Protecting,

upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan pertanian ulat sutera dengan baik adalah dengan dilakukan pengawasan baik terhadap program yang berjalan maupun selama kegiatan pemeliharaan ulat sutera namun pada pelaksanaannya masih kurang pengawasan terhadap hal tersebut. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah mencapai kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat yang diberdayakan. Namun berdasarkan hasil penelitian, masyarakat belum mampu mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah masyarakat dengan usaha pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Adapun terkait kemandirian, masyarakat juga belum mampu untuk mandiri dalam usahanya karena masih bergantung terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

b.Saran

1. Pemerintah daerah kabupaten Soppeng yang menangani pertanian ulat sutera agar membuat atau meningkatkan program pemberdayaan yang lebih partisipatif bagi masyarakat petani agar mampu merangkul semua petani dalam program pemberdayaannya.

2. Berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, agar pemerintah daerah memberikan suatu inovasi pemecahan

masalah yang lebih baik dari sekedar pemberian bantuan.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap petani ulat sutera mulai dari proses pemeliharaan sampai pada penjualan hasil pertanian

c. Implikasi

Penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa pentingnya peran dari pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Soppeng serta memiliki daya yang kuat untuk menggerakkan masyarakat. Apabila pada suatu usaha telah melibatkan pemerintah daerah maka akan memberikan harapan yang besar untuk usaha tersebut dapat maju. Sama seperti usaha persuteraan yang kini telah ditangani oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengembalikan kejayaan sutera sebagai nilai lokal Kabupaten Soppeng. Melalui program yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk membantu pertanian ulat sutera kedepannya bisa mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

9. Daftar Pustaka

- Adiwilangga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Azun, M. (2018). *Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Jamaluddin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Pustaka Setia.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Kencana.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindoPersada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom &*

*Pemberdayaan Masyarakat. Citra
Utama.*

- Sumaryadi, I. N. (2013). *Sosiologi
Pemerintahan, dari Perspektif
Pelayanan,
Pemberdayaan, Interaksi, dan
Sistem Kepemimpinan Pemerintahan
Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian
Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta